

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : MIFTAHUL JANNAH
NPM : 1705170120
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

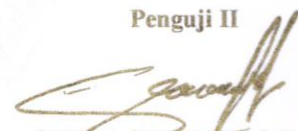
Nama Lengkap : MIFTAHUL JANNAH
NPM : 1705170120
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

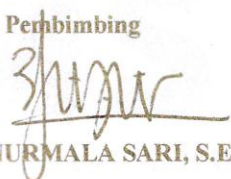
Penguji I


Dr. WIDIA ASTUTY, S.E, M.Si

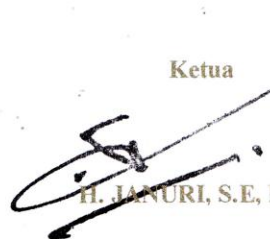
Penguji II


SURYA SANJAYA, S.E, MM

Pembimbing


Dr. EKA NURMALA SARI, S.E, M.Si

Ketua


H. JANURI, S.E, M.Si



Sekretaris


Dr. ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MIFTAHUL JANNAH

N.P.M : 1705170120

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak, CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
NPM : 1705170120
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, Ak, CA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	perbaiki spasi nya	14/9 21	2/1
Bab 2	perbaiki konsep di paragraf buat penjelasan hubungan antara variabel yg dididit oleh tem & peneliti terdahulu.	14/9 21	2/1
Bab 3	perbaiki jurnal, uji validitas dan uji reliabilitas belum ada.	14/9 21	2/1
Bab 4	Desinyat data yg jawaban komputer belum ada, permasalah masih belum bgn.	14/9 21	2/1
Bab 5	kesimpulan perbaiki. sama harus operasi sesuai dgn temu peneliti.	14/9 21	2/1
Daftar Pustaka	jurnal Mendelay, sitasi belum ada selain ptk, buat abstrak.	14/9 21	2/1
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—	—	—

Medan, 27 September 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, Ak, CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
NPM : 1705170120
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmalia Sari, SE, M.Si, Ak, CA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	deskriptif data untuk indikatornya buat penyajiannya, pembahasannya masalahnya, deskriptif hit, kenapa ada pengaruh	23/9/21	3/
Bab 5	perluah spasi, jangan kosong badan.	19/9/21	3/
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC draft skripsi lanjut ke sidang	27/9/21	3/

Medan, 27 September 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Dr. Zuhri Hakim, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmalia Sari, SE, M.Si, Ak, CA)

ABSTRAK

Miftahul Jannah, 1705170120, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi. 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah Kota Medan yang tergabung pada Tim anggaran yang berjumlah 31 dinas dan badan dikali 2 orang, sehingga populasi berjumlah 62 orang, sedangkan sampel yang menjadi responden sebanyak 36 orang yang mengisi dan mengembalikan kuesioner dengan lengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Sistem Informasi berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan dan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbi'l alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana (S-1) pada program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul proposal skripsi ini yaitu : **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan”**.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis banyak menerima dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Riva Ubar Harahap S.E, M.Si Selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna bagi peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Pegawai beserta Staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta informasi yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ayahanda Suratman dan Ibunda tercinta Fauziah Hanum serta Abang Aditya Wisnu yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang, serta doa restu untuk selalu semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman seperjuangan saya, Srikandi Negara Harahap, Naila Sakhiya, Wanda Pratiwi, Triany Hardianti dan Febi Satria yang selalu memberikan saya semangat dalam menulis Skripsi ini.

10.Seluruh teman - teman saya kelas C Akuntansi Pagi Angkatan 2017
terimakasih telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

11.Semua pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan saran
serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Oleh
karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik
yang membangun. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan
semua pihak, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 30 September 2021

Miftahul Jannah

1705170120

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis	11
1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11
a. Pengertian Keuangan Daerah	11
b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	11
c. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
d. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	15
a. Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	15
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	17
c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	18
1) Lingkungan Pengendalian	19
2) Penilaian Resiko.....	24
3) Kegiatan Pengendalian	25
4) Informasi dan Komunikasi	26
5) Pemanfaatan Pengendalian Intern	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Konseptual	29
D. Hipotesis.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional Variabel.....	35
1. Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	35
2. Lingkungan Pengendalian (X).....	36
3. Penilaian Resiko (X2)	36
4. Kegiatan Pengendalian (X3)	36
5. Informasi Komunikasi (X4)	37
6. Pemantauan (X5).....	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisa Data.....	50
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	50
2. Regresi Linier Berganda.....	51
a. Uji Normalitas	52
b. Uji Multikolinieritas	53
c. Uji Heterokedasitasitas	53
d. Uji Autokorelasi.....	54
3. Pengujian Hipotesis	55
a. Uji Hipotesis Stimultas (Uji-t).....	55
b. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-F)	55
c. Uji Determinan (R2)	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Deskripsi Peneitian.....	57
a. Demografi Responden	57
b. Deskripsi Jawaban Responden	59
1) Variabel Lingkungan Pengendalian (X1)	59
2) Variabel Penilaian Resiko (X2)	60
3) Variabel Kegiatan Pengendalian (X3)	61

4) Variabel Sistem Informasi (X4)	62
5) Variabel Pemantauan	63
6) Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah	64
2. Analisis Asumsi Klasik	65
a. Uji Normalitas	65
b. Uji Multikolineritas	68
c. Uji Heterokedastisitas	70
d. Uji Autokorelasi.....	71
3. Analisis Regresi Linear Berganda	72
4. Pengujian Hipotesis	74
a. Uji Parsial (Uji t)	74
1) Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Nilai Perusahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	75
2) Pengaruh Penilaian Resiko Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.....	76
3) Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Pengolaan Keuangan Daerah	77
4) Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.....	77
5) Pengaruh Pemantauan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.....	78
b. Uji Stimultan (UjiF).....	79
5. Koefisien Determinasi	80
B. Pembahasan.....	81
1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	81
2. Pengaruh Penilaian Resiko Terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	82
3. Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	83
4. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	84

5. Pengaruh Pemantauan Terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	85
6. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi Dan Pemantauan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Pembahasan	88
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini Audit Pemerintah Kota Medan Tahun 2015-2020	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	37
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	39
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian SKPD di Kota Medan	40
Tabel 3.4 Skala Pengukuran Likert	42
Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel Lingkungan Pengendalian	44
Tabel 3.6 Uji Validitas Variabel Penilaian Resiko.....	45
Tabel 3.7 Uji Validitas Variabel Kegiatan Pengendalian.....	45
Tabel 3.8 Uji Validitas Variabel Sistem Informasi	46
Tabel 3.9 Uji Validitas Variabel Pemantauan.....	46
Tabel 3.10 Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah	47
Tabel 3.11 Uji Reliabilitas Variabel X Dan Y	49
Tabel 3.12 Pengambilan Keputusan ada Tidaknya Autokorelasi.....	55
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Usia	58
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Lama Bekerja	58
Tabel 4.4 Deskripsi Jawaban Variabel Lingkungan Pengendalian	59
Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Variabel Penilaian Resiko.....	60
Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Variabel Kegiatan Pengendalian.....	61
Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Variabel Sistem Informasi	62
Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Variabel Pemantauan.....	63
Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah	64
Tabel 4.10 Uji Kolmogrov-Smirnov	66
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas.....	69
Tabel 4.12 Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Berganda	72
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Parsial (Uji-T).....	75
Tabel 4.15 Uji Pengujian Stimultan (Uji F).....	79
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Hasil Uji Grafik Histogram	67
Gambar 4.2 Hasil Uji P-Plot	68
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Tujuan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator Perencanaan, pemerintah menyusun perencanaan pembangunan sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan. Kemudian Penganggaran, Pemerintah menyusun rencana belanja dan pendapatan dengan mengacu pedoman dan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Pelaksanaan, anggaran pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan melalui rekening pemerintah. Penatausahaan, Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Pelaporan, Pelaporan merupakan rutinitas yang harus dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas atau keseimbangan pemerintah dengan mengantisipasi penyelewengan dan Tindakan yang tidak diinginkan. Pertanggung Jawaban, Merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kesediaan dan penyampaian hasil laporan yang telah dilaporkan dengan siap menerima konsekuensi yang telah ditetapkan dan selanjutnya Pengawasan, Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005)

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah kota Medan sebagai suatu entitas pelaporan masih mengalami kesulitan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Masalah lainnya adalah laporan keuangan masih

cenderung dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan dimaksud, melalui internet, surat kabar atau akses publik lainnya belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan.

Tabel 1.1 Opini Audit Pemerintah Kota Medan Tahun 2015-2020

Tahun	Opini Audit yang diterima
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Dengan Pengecualian
2017	Wajar Dengan Pengecualian
2018	Wajar Dengan Pengecualian
2019	Wajar Dengan Pengecualian
2020	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber : <https://www.bpk.go.id/>

Adapun fenomena yang terjadi dalam pengelola keuangan daerah di Kota Medan adalah terkait dengan penurunan Opini Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, dimana pada tahun 2015 Pemerintah Kota Medan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, kemudian dari 2016-2020 menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini tentunya menjadi catatan seharusnya pemerintah Kota Medan mampu meningkatkan Opini Audit Kembali menjadi Wajar Tanpa Pengecualian sebagai wujud keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang bebas dari penyimpangan, dan sesuai dengan komponen pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan sampai pengawasan serta sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

Secara umum, permasalahan yang terjadi dikarenakan kelemahan sistem pengendalian intern banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja. Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai kualitas laporan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintah. Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerinta deaerah.

Menurut tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern. Melalui penguatan SPIP, diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat memperoleh opini yang semakin baik. Sebab dengan meningkatnya opini yang diberikan BPK atas suatu laporan keuangan, berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambilan

keputusan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, SPIP yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2014).

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Penilaian Resiko merupakan sebuah Tindakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi keadaan untuk memberikan kinerja yang baik, Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Medan melakukan penandatanganan peningkatan kinerja, hal ini karena di sebahagian OPD tidak melakukan evaluasi

kinerja, hal ini dilakukan Untuk mengembangkan manajemen Pemerintahan yang semakin melayani, lanjut Wali Kota, Pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, telah mengeluarkan Permenpan No 53 Tahun 2014, tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. (<https://pekerjaanumum.pemkomedan.go.id/artikel-391-seluruh-kepala-opd-dan-camat-dilingkungan-pemko-medan-tandatanganiperjanjian-kinerja-dengan-wali-kota-medan.html>)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur.

Fenomena selanjutnya yang terjadi yaitu Pemko Medan tidak transparansi, banyak dana-dana yang dipotong dari OPD-OPD. Contohnya lagi seperti kemarin ada anggaran Rp 100 Milliar yang katanya Rp 27 Milliar sudah dipakai BNPB, Rp 39 Milliar dipakai untuk bansos. Ada juga anggaran yang dipotong di sekretariat Dewan sekitar Rp 60 Milliar, yang sampai saat ini anggaran tidak tahu kemana. Saya tidak mau dana pandemi ini disalahgunakan. (<https://www.orbitdigitaldaily.com/pengelolaan-dana-pandemi-covid-19-tak-transparan-dprd-minta-kpk-turun-ke-medan/>)

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Fenomena yang terjadi terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah terkait dengan informasi dan komunikasi yaitu masih ditemukan beberapa OPD yang tidak melakukan update informasi di situs resminya, misalnya di Dinas Pariwisata Kota Medan, berita terakhir yang dimuat adalah tahun 2018 sedangkan saat ini telah memasuki tahun 2021. (<http://www.pariwisata.pemkomedan.go.id/>)

Pemantauan adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Berdasarkan fenomena dan uraian teori di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Opini audit yang diterima Pemerintah Kota Medan 5 tahun terakhir belum memuaskan.
2. Masih ditemukan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melakukan evaluasi kinerja dalam melihat keberhasilan target dan tujuan yang di cita-citakan.
3. Ditemukan masalah transparansi anggaran yang tidak terwujud di beberapa OPD.
4. Terjadi sebuah masalah dalam hal keaktifan situs resmi dan media sosial di beberapa OPD yang mengakibatkan masyarakat kesulitan melakukan akses informasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan?

4. Apakah Informasi Komunikasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan?
5. Apakah Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan?
6. Apakah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penilaian Resiko terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Informasi Komunikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk strategi peningkatan kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat konsistensi hasil dan perluasan penelitiannya, sehingga bermanfaat sebagai pembandingan dan pengembangan hasil penelitian sejenis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor fundamental terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”
(Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Mamesah (dalam halim, 2007;23) menyatakan bahwa : keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- 3) Penerimaan daerah
- 4) Pengeluaran daerah
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

d. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, Adapun indikator dari Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :

1) Perencanaan

Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan.

2) Penganggaran

Pemerintah menyusun rencana belanja dan pendapatan dengan mengacu pedoman dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

3) Pelaksanaan

Anggaran pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran. Semua penerimaan dan

pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan melalui rekening pemerintah.

4) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara.

5) Pelaporan

Pelaporan merupakan rutinitas yang harus dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas atau keseimbangan pemerintah dengan mengantisipasi penyelewengan dan Tindakan yang tidak diinginkan.

6) Pertanggung Jawaban

Merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kesediaan dan penyampaian hasil laporan yang telah dilaporkan dengan siap menerima konsekuensi yang telah ditetapkan.

7) Pengawasan

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Defenisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah seharusnya dilandasi dengan pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Pengertian utama tentang sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

“Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerinta deaerah”.

Selama ini acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada instansi pemerintah adalah pengawasan melekat yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan dan pengawasan, instruksi presiden No. 01 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat, yang telah disempurnakan melalui keputusan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004.

Definisi pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut:

“Pengawasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern dan selanjutnya disebut waskat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan suatu kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku”.

Terminologi pengawasan melekat dalam aturan tersebut disepadankan dengan pengendalian manajemen atau pengendalian intern. Unsur-unsur pengawasan yang melekat yang dimaksud adalah pengorganisasian personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervise, dan review intern.

Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang diciptakan manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Senada dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mendefinisikan sistem pengendalian sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian, efektifitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan”.

Sedangkan sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan”.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen, jika manajemen puncak merasa bahwa pengendalian intern itu penting maka anggota dalam organisasi akan merasakan hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Di lain pihak, jika pengendalian intern tidak dijadikan kepentingan utama manajemen puncak dan hanya dijadikan lip service maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian intern tidak dapat dicapai dengan efektif.

Menurut tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan

ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera dalam pengertian pengendalian menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway Commision).

Sedangkan tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang :

- 1) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
- 2) Keandalan Pelaporan Keuangan.
- 3) Pengamanan Aset Negara.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Agar mencapai pengendalian intern yang memadai maka diperlukan beberapa komponen pengendalian intern seperti yang diungkapkan COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway), penelitian COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway) mengatakan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang ada dibawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai. Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, bukan absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian resiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Berdasarkan kelima komponen SPIP tersebut dapat diketahui bahwa komponen lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk keseluruhan komponen. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi merupakan saluran (*channel*) terhadap ketiga komponen pengendalian lainnya (Mahmudi 2010: 22). Penerapan unsure-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

a) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu

irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Dalam menerapkan unsur pengendalian intern, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika, yang dapat dilakukan dengan :
 - 1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
 - 2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.
 - 3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
 - 4) Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern.
 - 5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- b. Komitmen terhadap kompetensi, yang dapat dilakukan dengan:
 - 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.

- 2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap penugasan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
- 4) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Merupakan kemauan dan kemampuan pimpinan untuk mampu menciptakan suasana yang kondusif yang mampu mendorong stafnya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Griffin dan Ebert dalam Modul Lingkungan Pengendalian BPKP Tahun 2009, gaya kepemimpinan yang dikenal ada 3 (tiga) jenis, yaitu :

1) Gaya kepemimpinan otokratik

Merupakan bentuk kepemimpinan dimana seorang pimpinan cenderung memberi perintah secara langsung dan meminta bawahannya untuk mematuhi.

2) Gaya kepemimpinan demokratik

Merupakan bentuk kepemimpinan dimana seorang pimpinan memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk memberikan masukan kepada atasannya sebelum mengambil keputusan.

3) Gaya bebas terkendali

Merupakan bentuk kepemimpinan dimana pimpinan memposisikan dirinya sebagai seorang konsultan bagi stafnya dan cenderung memberi kewenangan kepada stafnya untuk mengambil keputusan. Menurut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepemimpinan yang kondusif dapat dilakukan dengan :

- a) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.
- b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja.
- c) Mendukung fungsi tertentu dalam SPIP.
- d) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.
- e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.
- f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, pengangguran, program, dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat dilakukan dengan :

- 1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah
- 2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah.
- 3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi pemerintah.

- 4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.
 - 5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
 - 2) Pegawai yang diberi wewenang memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
 - 3) Pegawai yang diberi wewenang tersebut memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, yang dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
 - 2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen
 - 3) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif, yang dapat dilakukan dengan:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 2) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2) Penilaian Risiko

Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi.

Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

Proses penilaian risiko berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

- 1) Identifikasi risiko, yang dapat dilakukan dengan Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. Dan Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan faktor eksternal.
- 2) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- 3) Analisis risiko, yang dapat dilakukan dengan Menetapkan kemungkinan terjadinya risiko dan Menetapkan dampak yang timbul akibat risiko dengan diidentifikasi benar- benar terjadi.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur.

Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian yang ada memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara tertulis.
- 6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, untuk dapat menciptakan komunikasi atas informasi menjadi efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus dapat memenuhi beberapa hal, yaitu:

- 1) Mampu menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi.
- 2) Mampu mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud. Pemantauan atas pengendalian intern dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) Pemantauan berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Evaluasi terpisah, dapat dilakukan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

- 3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audir dan review lainnya. Pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	HASIL PENELITIAN
1.	¹ Elizar Sinambela ² Fitriani Saragih ³ Eka Nurmala Sari 2018	Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara	Hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut: Pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara belum efektif terlihat dari APBD yang menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja belum dapat mencapai target, Pada Struktur APBD saat ini masih belum sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pada bagian pembiayaan daerah yang ternyata belum jelas diungkap pada struktur APBD, selain itu dapat dinyatakan pula bahwa masih perlunya adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah Sumatera Utara untuk menganalisis lebih lanjut terhadap struktur APBD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	¹ Dodik Slamet Pujiono ² Hari Sukarno ³ Novi Puspitasari	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagai berikut: Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di

	2016	Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara) -	Maluku Utara, Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara, Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara.
3.	¹ Oka Reza ditya ² Welly Surjono 2012	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu

C. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian dapat dilakukan dengan cara penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan

penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka pengelolaan keuangan daerah akan mendapatkan dampak yang baik sehingga pengelolaan keuangan bisa berjalan efektif.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Sinambela, Saragih dan Sari (2018), Ditya dan Suryono (2012) serta Ditya dan Surjono (2012)

2. Pengaruh Penilaian Resiko terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

Penilaian risiko dapat dilakukan dengan tahapan identifikasi risiko, menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko dan analisis risiko, ketika risiko-risiko dapat ditabulasi dan di analisis tentunya keuangan daerah yang dikelola akan menjadi efektif. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016), Ditya dan Surjono (2012) dan Sinambela, Saragih dan Sari (2018)

3. Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur.

Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah

Hal ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Sinambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012)

4. Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami

tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah, hal ini dapat dilakukan ketika informasi dan komunikasi pada instansi dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Nambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012)

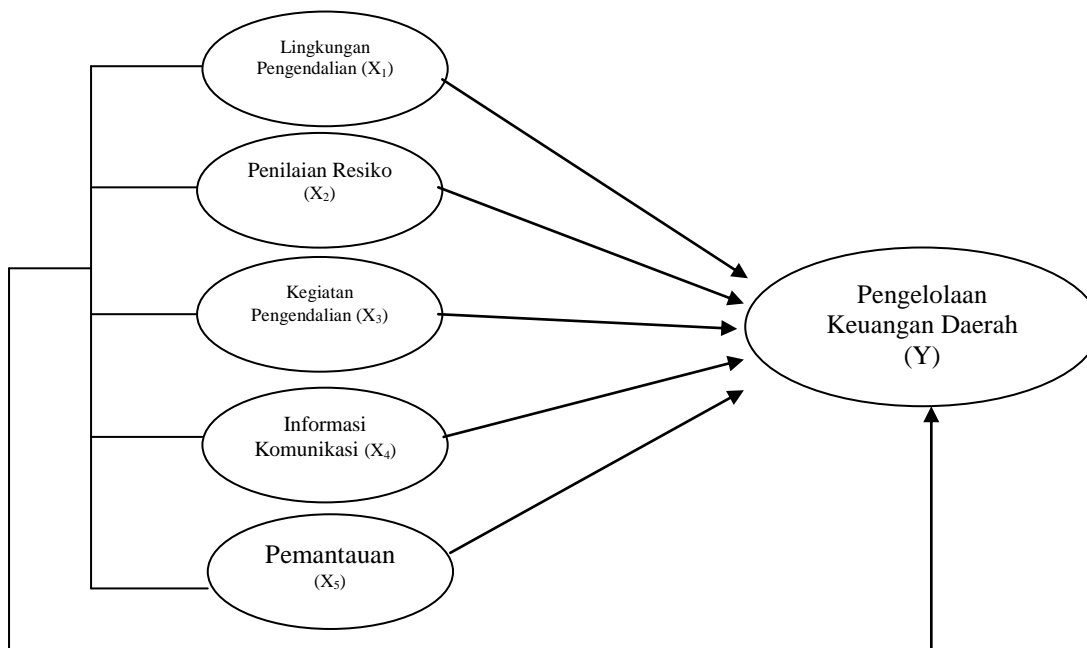
5. Pengaruh Pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Nambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012)

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka seperti berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, maka dapat ditarik hipotesis bahwa :

1. Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
2. Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
3. Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

4. Informasi Komunikasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
5. Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
6. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Komunikasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini meneliti pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Perencanaan
- b) Penganggaran
- c) Pelaksanaan
- d) Penatausahaan
- e) Pelaporan
- f) Pertanggung Jawaban
- g) Pengawasan

2. Lingkungan Pengendalian (X₁)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Integritas
- b) Komitmen
- c) Kepemimpinan
- d) Struktur
- e) Pendelegasian Wewenang

3. Penilaian Resiko (X₂)

Penilaian resiko merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hal-hal terburuk yang tidak diinginkan. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Identifikasi Resiko
- b) Faktor Resiko
- c) Analisis Resiko

4. Kegiatan Pengendalian (X₃)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pokok
- b) Pemyesuaian
- c) Keterkaitan
- d) Kebijakan Prosedur

5. Informasi Komunikasi (X₄)

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Penyediaan dan Pemanfaatn
- b) Pengelolaan Kebijakan Prosedur

6. Pemantauan (X₅)

Pemantauan adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a) Berkelanjutan
- b) Evaluasi terpisah
- c) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tabel 3.1 Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah	1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Pelaksanaan 4. Penatausahaan 5. Pelaporan 6. Pertanggung Jawaban 7. Pengawasan	Interval
Lingkungan Pengendalian	Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang	1.Integritas 2. Komitmen	Interval

(X ₁)	tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.	3. Kepemimpinan 4. Struktur 5. Pendelegasian Wewenang	
Penilaian Resiko (X ₂)	Penilaian resiko merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hal-hal terburuk yang tidak diinginkan	1. Identifikasi Resiko 2. Faktor Resiko 3. Analisis Resiko	Interval
Kegiatan Pengendalian (X ₃)	Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada.	1. Kegiatan Pokok 2. Pemyesuaian 3. Keterkaitan 4. Kebijakan Prosedur	Interval
Informasi Komunikasi (X ₄)	Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik.	1. Penyediaan dan Pemanfaatn 2. Pengelolaan	Interval
Pemantauan (X ₅)	Suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pendedalian intern telah berjalan efektif.	1. Berkelanjutan 2. Evaluasi terpisah 3. Tindak Lanjut Rekomendasi	Interval

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau disebut juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Medan.

Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2021 dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		Maret-2021	April-2021	Mei-2021	Juni-2021	Juli-2021	Agustus-2021	September-2021
1	Riset Pendahuluan	■						
2	Pengumpulan data Awal		■					
3	Pengumpulan Teori		■					
4	Pembuatan Proposal		■					
5	Bimbingan& penyelesaian Proposal		■	■				
6	Seminar proposal				■			
7	Analisa pengelolaan data					■		
8	Bimbingan&penyelesaian hasil penelitian					■	■	■
9	Sidang skripsi						■	■

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah Kota Medan yang tergabung pada

Tim anggaran yang berjumlah 31 dinas dan badan dikali 2 orang, sehingga populasi berjumlah 62 orang.

Tabel 3.3
Populasi dan Sampel Penelitian
SKPD di Kota Medan

No	Badan/Dinas/Kantor
1	Dinas Pendidikan Kota Medan
2	Dinas Kesehatan Kota Medan
3	Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
5	Dinas Sosial Kota Medan
6	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7	Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran
8	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan
10	Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan
11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
14	Dinas Perhubungan Kota Medan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
18	Dinas Pertanian dan Perikanan
19	Dinas Perindustrian Kota Medan
20	Dinas Perdagangan Kota Medan
21	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
22	Dinas Pariwisata Kota Medan
23	Dinas Kebudayaan Kota Medan
24	Dinas Perpustakaan Kota Medan
25	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
26	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengemban
27	Badan Penelitian dan Pengembangan
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
29	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
30	Badan KESBANGPOL
31	Badan Badan Penanggulangan Bencana

Sumber : Pemko Medan, diolah (2021)

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Penulis menggunakan model *probability sampling* atau *random sampling* yaitu *accidental sampling* yaitu penyebaran kuesioner ke seluruh populasi dan melihat dari 62 jumlah yang merespon kuesioner tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2018, hal. 194).

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat menggunakan kuesioner online. Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan nilai apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan / pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan

kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2018, hal. 199).

Skala yang digunakan adalah skala Interval melalui skala Likert yang telah disediakan. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial (Azuar *et al*, 2014). Dengan skala likert ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Responden diminta untuk memberikan pendapat dari setiap butir pertanyaan/pernyataan yang diajukan oleh penulis. Adapun penilaian kuesioner yang diberikan oleh penulis kepada responden dengan menggunakan skala likert adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Skala Pengukuran Likert

Pertanyaan	Bobot
Sangat setuju (SS)	1
Setuju (S)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	5

Sebelum kuesioner disebarkan oleh peneliti kepada responden, maka kuesioner perlu diuji terlebih dahulu agar data yang akan dianalisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Artinya, instrumen pada kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya cukup layak atau tidak, sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya.

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi antara variabel (X) dan variabel (Y)

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$ = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum y$ = Jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum x^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum y^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$(\sum x)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X

$(\sum y)^2 =$ Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum x y) =$ Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi person dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 36 pegawai yang tersebar di SKPD Kota Medan. Dimana $n = 36$ pada tingkat signifikan 5 % dilakukan pengukuran dengan SPSS versi 21.0 akan dilihat tingkat signifikan atas semua pernyataan.

Pengujian validitas tiap instrument bebas dengan cara mengkorelasikan tiap butir pertanyaan tersebut. Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak valid dengan membandingkan r_{hitung} terhadap $r_{tabel} = 0.220$ (lihat r tabel untuk $N=36$ dengan signifikansi 1 arah 0,05), dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$.

1) Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel Lingkungan Pengendalian (X_1)

Item Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Soal 1	0.495	0,220	Valid
Soal 2	0.711	0,220	Valid
Soal 3	0.774	0,220	Valid
Soal 4	0.538	0,220	Valid
Soal 5	0.684	0,220	Valid

Sumber : Data SPSS, diolah (2021)

Dari data uji validitas di atas dapat kita lihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel Lingkungan pengendalian memiliki nilai *Corrected item-*

total correlation atau kita sebut dengan r hitung lebih besar dari r tabel (0,220), dengan demikian seluruh butir pertanyaan variabel Lingkungan pengendalian dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya.

. Tabel 3.6 Uji Validitas Variabel Penilaian resiko (X₂)

Item Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Soal 1	0.785	0,220	Valid
Soal 2	0.800	0,220	Valid
Soal 3	0.807	0,220	Valid
Soal 4	0.758	0,220	Valid
Soal 5	0.306	0,220	Valid

Sumber : Data SPSS , diolah (2021)

Dari data uji validitas di atas dapat kita lihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel penilaian resiko memiliki nilai *Corrected item-total correlation* atau kita sebut dengan r hitung lebih besar dari r tabel (0,220), dengan demikian seluruh butir pertanyaan variabel penilaian resiko dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 3.7 Uji Validitas Variabel Kegiatan Pengendalian (X₃)

Item Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Soal 1	0.765	0,220	Valid
Soal 2	0.753	0,220	Valid
Soal 3	0.750	0,220	Valid
Soal 4	0.724	0,220	Valid
Soal 5	0.788	0,220	Valid

Sumber : Data SPSS , diolah (2021)

Dari data uji validitas di atas dapat kita lihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel kegiatan pengendalian memiliki nilai *Corrected item-*

total correlation atau kita sebut dengan r hitung lebih besar dari r tabel (0,220), dengan demikian seluruh butir pertanyaan variabel kegiatan pengendalian dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 3.8 Uji Validitas Variabel Sistem Informasi (X₄)

Item Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Soal 1	0.869	0,220	Valid
Soal 2	0.776	0,220	Valid
Soal 3	0.674	0,220	Valid
Soal 4	0.833	0,220	Valid
Soal 5	0.604	0,220	Valid

Sumber : Data SPSS , diolah (2021)

Dari data uji validitas di atas dapat kita lihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel sistem informasi memiliki nilai *Corrected item-total correlation* atau kita sebut dengan r hitung lebih besar dari r tabel (0,220), dengan demikian seluruh butir pertanyaan variabel sistem informasi dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 3.9 Uji Validitas Variabel Pemantauan (X₅)

Item Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Soal 1	0.770	0,220	Valid
Soal 2	0.713	0,220	Valid
Soal 3	0.806	0,220	Valid
Soal 4	0.629	0,220	Valid
Soal 5	0.801	0,220	Valid

Sumber : Data SPSS , diolah (2021)

Dari data uji validitas di atas dapat kita lihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel pemantauan memiliki nilai *Corrected item-total*

correlation atau kita sebut dengan r hitung lebih besar dari r tabel (0,220), dengan demikian seluruh butir pertanyaan variabel pemantauan dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 3.10 Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Item Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Soal 1	0.836	0,220	Valid
Soal 2	0.731	0,220	Valid
Soal 3	0.731	0,220	Valid
Soal 4	0.603	0,220	Valid
Soal 5	0.566	0,220	Valid
Soal 6	0.668	0,220	Valid
Soal 7	0.322	0,220	Valid

Sumber : Data SPSS , diolah (2021)

Dari data uji validitas di atas dapat kita lihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel pemantauan memiliki nilai *Corrected item-total correlation* atau kita sebut dengan r hitung lebih besar dari r tabel (0,220), dengan demikian seluruh butir pertanyaan variabel pemantauan dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang diteliti. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Suatu kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Pengukuran uji reliabilitas terhadap kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik *cronbach alpha* (α) dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Reliabilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* (α) dengan rumus alpha (α) adalah sebagai berikut :

$$r_i = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right]$$

(Kuncoro, 2013)

Keterangan:

R_i : Reliabilitas instrumen

σ_1^2 : Varians Total

k : Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$: Jumlah varians butir

Menentukan reliabilitas dari alat ukur dapat dilihat dari nilai alfa jika nilai alfa lebih besar dari nilai r_{tabel} , skala dikelompok ke dalam lima kelas dengan renge yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat di interprestasikan sebagai berikut :

1. Nilai *alpha Cronbach* 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliable
2. Nilai *alpha Cronbach* 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliable
3. Nilai *alpha Cronbach* 0,41 s.d. 0,60, berarti cukup reliable
4. Nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d. 0,80, berarti reliable
5. Nilai *alpha Cronbach* 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliable

(Juliansyah Noor, 2012 : 165)

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap butir pernyataan yang termasuk dalam kategori *valid*. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba

instrument sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien *reliabilitas* bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,600. Tabel menunjukkan hasil uji reabilitas untuk empat variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.11 Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	N of item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	5	0,754	Reliabel
Penilaian Resiko	5	0,768	Reliabel
Kegiatan Pengendalian	5	0,794	Reliabel
Sistem Informasi	5	0,790	Reliabel
Pemantauan	5	0,791	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah	7	0,752	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya nilai *Cronbachs Alpha* variabel lingkungan pengendalian dalam uji reliabilitas sebesar 0,754 > 0,600 (standar normal pengujian reliabilitas), dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran data variabel dinyatakan terpercaya atai reliabel.

Nilai *Cronbachs Alpha* variabel kegiatan pengendalian dalam uji reliabilitas sebesar 0,768 > 0,600 (standar normal pengujian reliabilitas), dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran data variabel dinyatakan terpercaya atai reliabel.

Nilai *Cronbachs Alpha* variabel lingkungan pengendalian dalam uji reliabilitas sebesar $0,794 > 0,600$ (standar normal pengujian reliabilitas), dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran data variabel dinyatakan terpercaya atau reliabel.

Nilai *Cronbachs Alpha* variabel sistem informasi dalam uji reliabilitas sebesar $0,790 > 0,600$ (standar normal pengujian reliabilitas), dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran data variabel dinyatakan terpercaya atau reliabel.

Nilai *Cronbachs Alpha* variabel pemantauan dalam uji reliabilitas sebesar $0,791 > 0,600$ (standar normal pengujian reliabilitas), dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran data variabel dinyatakan terpercaya atau reliabel.

Nilai *Cronbachs Alpha* variabel pengelolaan keuangan daerah dalam uji reliabilitas sebesar $0,752 > 0,600$ (standar normal pengujian reliabilitas), dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran data variabel dinyatakan terpercaya atau reliabel.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum,

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

2. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti dengan maksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2018).

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + e$$

Dimana :

- Y = Variabel Dependen
- a = konstanta
- X₁ = Lingkungan Pengendalian
- X₂ = Penilaian Resiko
- X₃ = Kegiatan Pengendalian
- X₄ = Informasi dan Komunikasi
- X₅ = Pemantauan
- e = Standard Error

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Penyimpangan asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Salah satu metode ujinya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik secara normal plot atau grafik histogram, dengan acuan sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan analisis grafik, uji normalitas dapat juga dilihat dengan analisis secara statistik dengan Uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan ketentuan jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel lebih kecil dari nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$) yang telah ditetapkan maka data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016).

Uji multikolinieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks kolerasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks kolerasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance- nya. Apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis terlepas dari gejala multikolinieritas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas juga dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan ToleranceValue. Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah: Mempunyai Tolerance Value ≥ 0.10 atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 (Ghozali, 2016).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Dan jika variance berbeda, disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan

melihat uji grafik plot. Uji grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Dengan dasar analisis (Ghozali, 2016) :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson (DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai DW hitung dengan DW tabel. Jika nilai DW hitung $>$ DW table maka tidak terdapat autokorelasi dalam modle tersebut (Ghozali, 2016).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada ketentuan berikut:

Tabel 3.12 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: (Ghozali, 2016)

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji t ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-F)

Untuk menguji nyata atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara serentak digunakan Uji F yang bertujuan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh dari variabel pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian Hipotesis:

- a. Jika tabel anova memiliki nilai signifikansi $>$ dari 0,05 dan F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika tabel anova memiliki nilai signifikansi $<$ dari 0,05 dan F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

c. Uji Determinan (R^2)

Uji determinan (R^2) pada intinya mengukur ketepatan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap hasil yang diperoleh. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Rumus untuk mengukur besarnya proporsi adalah:

$$KD = R^2 \times 100 \%$$

Dimana: KD = Koefisien Determinan.

R^2 = Kuadrat Korelasi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

a) Demografi Responden

Peneliti melakukan penyebaran angket kepada seluruh pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah Kota Medan yang tergabung pada Tim anggaran, Adapun kuesioner yang terisi berjumlah 36 (tiga puluh enam) data responden.

Adapun karakteristik responden di jelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	14	38.9	38.9	38.9
Valid Perempuan	22	61.1	61.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya jenis kelamin terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah perempuan dengan besaran nilai 61,1% atau sebanyak 22 orang, sedangkan laki-laki sebesar 38,9% atau sebanyak 14 orang.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<30 Tahun	8	22.2	22.2	22.2
30-35 Tahun	16	44.4	44.4	66.7
Valid 36-40 Tahun	7	19.4	19.4	86.1
>40 Tahun	5	13.9	13.9	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya usia responden yang terbanyak (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 30-35 tahun sebanyak 16 orang, usia <30 tahun sebanyak 8 orang, usia 36-40 tahun sebanyak 7 orang dan usia >40 tahun sebanyak 5 orang.

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<2 Tahun	17	47.2	47.2	47.2
Valid 2-5 Tahun	9	25.0	25.0	72.2
>5 Tahun	10	27.8	27.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya lama bekerja (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang bekerja <2 Tahun sebanyak 17 orang, kemudian >5 Tahun sebanyak 10 orang, dan 2-5 Tahun sebanyak 9 orang.

b) Deskripsi Jawaban Responden

Untuk melihat jawaban responden atas kuesioner yang telah diisi, maka peneliti melakukan tabulasi data untuk di deskripsikan sebagaimana tabel di bawah ini :

1) Variabel Lingkungan Pengendalian (X_1)

Tabel 4.4 Deskripsi Jawaban Variabel Lingkungan Pengendalian (X_1)

Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Nilai Skor	
	1		2		3		4		5		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Pemerintah daerah harus memiliki integritas dan nilai-nilai etika.	2	5,6	21	58,3	12	33,3	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Pemerintah daerah harus memiliki komitmen terhadap kompetensi.	2	5,6	22	61,1	10	27,8	2	5,6	0	0,0	36	100,0
Pemerintah daerah harus mempunyai falsafah manajemen dan gaya operasi.	2	5,6	23	63,9	10	27,8	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Dalam instansi harus memiliki dewan komisaris atau komite audit atau yang setara dengan dewan komisaris atau komite audit.	4	11,1	27	75,0	4	11,1	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Adanya pelimpahan tugas dan wewenang dalam instansi.	3	8,3	20	55,6	12	33,3	1	2,8	0	0,0	36	100,0

Sumber : Data SPSS (2021)

Berdasarkan pertanyaan nomor 1 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 58,3% atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 2 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 61,1 % atau sebanyak 22 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 3 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 63,9 % atau sebanyak 23 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 4 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 75,0 % atau sebanyak 27 orang. Berdasarkan

pertanyaan nomor 5 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 75 % atau sebanyak 27 orang.

2) Variabel Penilaian Resiko (X_2)

Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Variabel Penilaian Resiko (X_2)

PERNYATAAN	SS		S		KS		TS		STS		Skor	
	1		2		3		4		5		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Adanya penilaian terhadap risiko.	2	5,6	22	61,1	12	33,3	0	0	0	0,0	36	100,0
Adanya penetapan metode pengukuran.	1	2,8	25	69,4	10	27,8	0	0	0	0,0	36	100,0
Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi risiko.	2	5,6	16	44,4	15	41,7	3	8,3	0	0,0	36	100,0
Adanya penetapan pengendalian internal.	2	5,6	24	66,7	8	22,2	2	5,6	0	0,0	36	100,0
Didalam instansi harus terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal.	20	55,6	15	41,7	1	2,8	0	0	0	0,0	36	100,0

Sumber : Data SPSS (2021)

Berdasarkan pertanyaan nomor 1 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 61,1 % atau sebanyak 22 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 2 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 69,4 % atau sebanyak 25 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 3 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 44,4 % atau sebanyak 16 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 4 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 66,7 % atau sebanyak 24 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 5 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 41,7 % atau sebanyak 15 orang.

3) Variabel Kegiatan Pengendalian (X₃)

Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Variabel Kegiatan Pengendalian (X₃)

PERNYATAAN	SS		S		KS		TS		STS		Skor	
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pemisahan kewajiban di instansi harus diterapkan secara memadai.	12	33,3	21	58,3	3	8,3	0	0	0	0,0	36	100,0
Di dalam instansi haruslah ada otorisasi	11	30,6	21	58,3	4	11,1	0	0	0	0,0	36	100,0
Dilakukannya pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.	11	30,6	22	61,1	3	8,3	0	0	0	0,0	36	100,0
Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan	9	25,0	23	63,9	3	8,3	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Pemisahan kewajiban di instansi harus diterapkan secara memadai.	6	16,7	11	30,6	17	47,2	2	5,6	0	0,0	36	100,0

Sumber : Data SPSS (2021)

Berdasarkan pertanyaan nomor 1 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 2 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 3 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 61,1 % atau sebanyak 22 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 4 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 63,9 % atau sebanyak 23 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 5 mayoritas responden menjawab kurang setuju sebesar 47,2 % atau sebanyak 17 orang.

4) Variabel Sistem Informasi (X₄)

Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Variabel Sistem Informasi (X₄)

PERNYATAAN	SS		S		KS		TS		STS		Skor	
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.	2	5,6	25	69,4	8	22,2	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Sistem informasi yang dipakai instansi haruslah berfungsi dengan baik.	4	11,1	26	72,2	5	13,9	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Di dalam instansi Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan.	4	11,1	20	55,6	11	30,6	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Sistem informasi telah membantu pekerjaan di instansi ini	6	16,7	21	58,3	8	22,2	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Sistem informasi telah berjalan baik di instansi ini	4	11,1	12	33,3	17	47,2	3	8,3	0	0,0	36	100,0

Sumber : Data SPSS (2021)

Berdasarkan pertanyaan nomor 1 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 69,4 % atau sebanyak 25 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 2 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 72,2 % atau sebanyak 26 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 3 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 55,6 % atau sebanyak 20 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 4 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 5 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 47,2 % atau sebanyak 17 orang.

5) Variabel Pemantauan (X₅)

Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Variabel Pemantauan (X₅)

PERNYATAAN	SS		S		KS		TS		STS		Skor	
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.kegiatan	10	27,8	22	61,1	2	5,6	1	2,8	1	2,8	36	100,0
Pemantauan dilaksanakan secara periodik.	7	19,4	24	66,7	4	11,1	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal.	10	27,8	21	58,3	4	11,1	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Instansi telah melakukan pemantauan yang baik	10	27,8	21	58,3	4	11,1	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Pemantauan sangat berguna dalam peningkatan kinerja	9	25,0	19	52,8	7	19,4	1	2,8	0	0,0	36	100,0

Sumber : Data SPSS (2021)

Berdasarkan pertanyaan nomor 1 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 61,1 % atau sebanyak 22 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 2 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 66,7 % atau sebanyak 24 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 3 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 4 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 58,3 % atau sebanyak 21 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 5 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 52,8 % atau sebanyak 19 orang.

6) Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

PERNYATAAN	SS		S		KS		TS		STS		Nilai Skor	
	1		2		3		4		5		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif	6	16,7	24	66,7	5	13,9	1	2,8	0	0,0	36	100,0
tujuan rencana kerja dan anggaran telah disesuaikan dengan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	9	25,0	18	50,0	9	25,0	0	0,0	0	0,0	36	100,0
pelaksanaan anggaran secara efektif ditentukan oleh usaha yang dikerahkan, kemampuan kualitas seseorang, partisipasi, penetapan sasaran, serta persepsi seseorang tentang tugas dan kewajibannya	3	8,3	23	63,9	9	25,0	1	2,8	0	0,0	36	100,0
Pada instansi tempat Saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas dan spesifik	4	11,1	29	80,6	3	8,3	0	0,0	0	0,0	36	100,0
Pelaporan anggaran rutin dilaksanakan setiap tahun dan dapat dievaluasi	1	2,8	25	69,4	8	22,2	2	5,6	0	0,0	36	100,0
pertanggungjawaban anggaran pada instansi ini dilakukan secara transparan dan dapat diakses dengan mudah	3	8,3	23	66,7	9	25,0	1	2,8	0	0,0	36	100,0
penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif dan telah diawasi dengan baik	10	27,8	18	50,0	7	19,4	1	2,8	0	0,0	36	100,0

Sumber : Data SPSS (2021)

Berdasarkan pertanyaan nomor 1 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 66,7 % atau sebanyak 24 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 2

mayoritas responden menjawab setuju sebesar 50,0 % atau sebanyak 18 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 3 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 63,9 % atau sebanyak 23 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 4 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 80,6 % atau sebanyak 29 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 5 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 6,94 % atau sebanyak 25 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 6 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 63,9 % atau sebanyak 23 orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 7 mayoritas responden menjawab setuju sebesar 50,0 % atau sebanyak 18 orang.

2. Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan dalam analisis regresi berganda. Dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut ini dapat dilihat grafik hasil penelitian data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS 21 adalah sebagai berikut :

1) Uji Kolmogorov Smirnov

Uji Kolmogorov Smirnov bertujuan agar dalam penelitian dapat mengetahui distribusi normal atau tidak antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Maka ketentuan untuk uji Kolmogorov Smirnov ini adalah :

- a) Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 ($\alpha = 5\%$ tingkat signifikan) maka data berdistribusi normal.
- b) Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 ($\alpha = 5\%$ tingkat signifikan) maka data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.10
Uji Kolmogorov-Smirnov

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Lingkungan n Pengenda lian	Kegiatan Pengend alian	Sistem Informasi	Pemantau an	Pengelolaa n Keuangan Daerah	Penilaian Resiko
N		36	36	36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19.2364	20.0000	19.0000	20.1818	27.9091	19.4182
	Std. Deviation	2.09906	2.34126	2.29331	2.42740	2.60536	1.93114
Most Extreme Differences	Absolute	.206	.191	.222	.143	.223	.251
	Positive	.128	.191	.222	.100	.138	.152
	Negative	-.206	-.136	-.191	-.143	-.223	-.251
Kolmogorov-Smirnov Z		1.525	1.416	1.649	1.060	1.654	1.859
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069	.076	.079	.212	.128	.122

a. Test distribution is Normal.

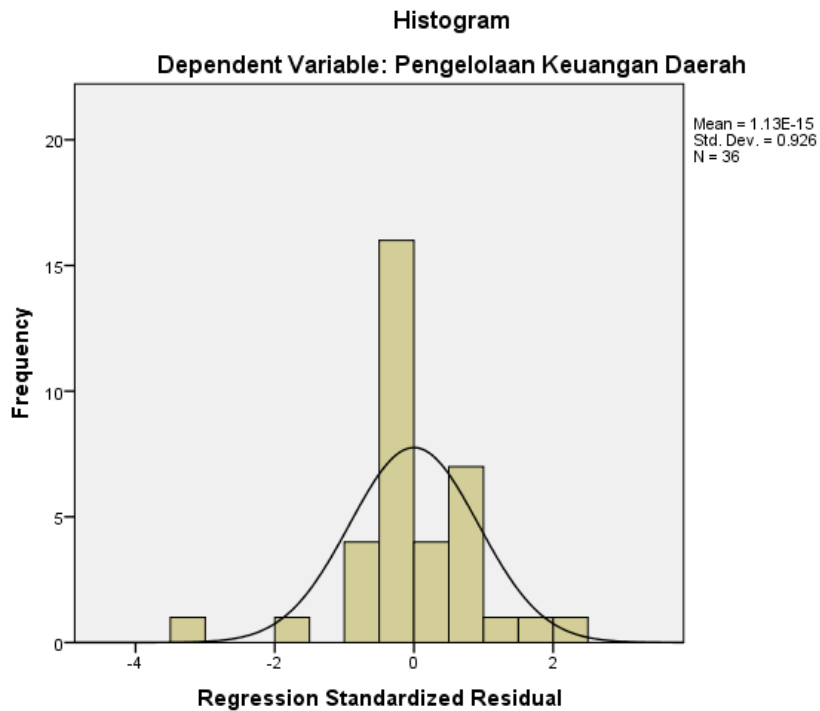
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Berdasarkan hasil uji *statistic one-sampel kolmogorov smirnov* yang terdapat pada tabel di atas dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05% sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

2) Grafik Histogram

Histogram adalah grafik batang yang berfungsi untuk menguji apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka data akan membentuk semacam lonceng. Apabila grafik terlihat jauh dari bentuk lonceng maka data tidak berdistribusi normal.



Gambar 4.1
Hasil Uji Grafik Histogram
Sumber : Hasil SPSS 21.0

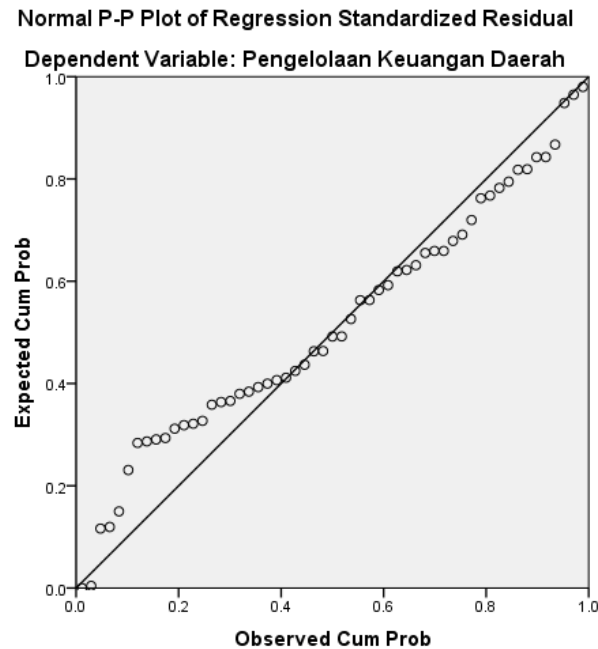
Grafik histogram pada gambar diatas menunjukkan pola distribusi normal karena memiliki kecenderungan yang berimbang, baik pada sisi kiri maupun pada sisi kanan dan kurva membentuk lonceng dengan hampir sempurna.

3) Uji Normal P-Plot of *Regression Standarized residual*

Uji ini digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat, apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal tersebut.

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.2
Hasil Uji P-Plot
Sumber : Hasil SPSS 21.0

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat diketahui hasil dari pengujian normalitas bahwa data menyebar disekitar diagram dengan titik – titiknya yang mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal dan uji normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolineritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Uji multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflating Factor* (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolineritas yang serius.

- b) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

Tabel 4.11
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)					
1 Lingkungan Pengendalian	.644	.188	.130	.359	2.787
Penilaian Resiko	.700	.292	.207	.277	3.611
Kegiatan Pengendalian	.109	.077	.052	.847	1.181
Sistem Informasi	.635	.116	.080	.306	3.273
Pemantauan	.246	.132	.090	.847	1.180

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel 4.11 diatas menunjukkan hasil uji multikolinieritas bahwa nilai VIF untuk masing – masing variabel adalah sebagai berikut :

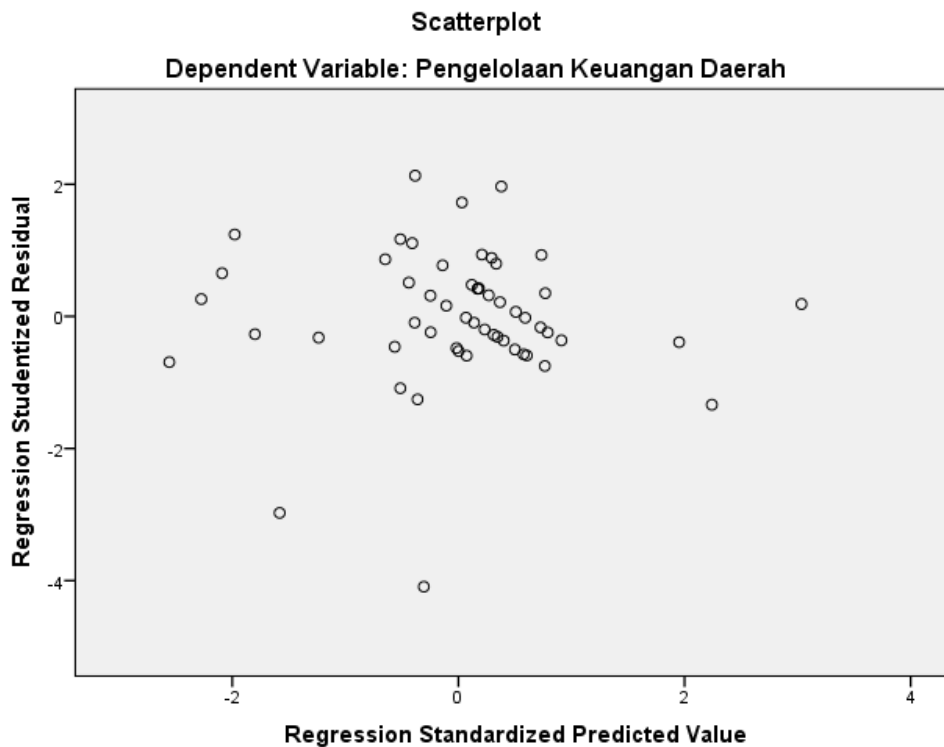
- 1) Nilai VIF Lingkungan Pengendalian (X1) sebesar $2,787 < 5$ maka variabel Lingkungan Pengendalian dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
- 2) Nilai VIF Penilaian Resiko (X2) sebesar $3,611 < 5$ maka variabel Penilaian Resiko dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
- 3) Nilai VIF Kegiatan Pengendalian (X3) sebesar $1,181 < 5$ maka variabel Penilaian Resiko dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
- 4) Nilai VIF Sistem Informasi (X4) sebesar $3,273 < 5$ maka variabel Penilaian Resiko dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
- 5) Nilai VIF Pemantauan (X5) sebesar $1,180 < 5$ maka variabel Penilaian Resiko dinyatakan bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot.

Dengan dasar analisis :

- 1) Jika ada pola tertentu (titik – titik) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari gambar 4.3 diatas terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang teratur. Serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*). Uji autokorelasi dapat dilihat menggunakan uji *statistic Durbin-Watson*. Dengan kriteria pengujian :

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Tabel 4.12
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	49 ^a	.000	1.615

a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi, Penilaian Resiko

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel 4.12 diatas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,615. Ketentuan, jika nilai Durbin – Watson berada diantara 1,55 sampai dengan 2,46 menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi (Algifari, 1997 dalam Hayati, 2010).

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai Durbin – Watson sebesar 1,615 hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

Berdasarkan uji asumsi klasik yang dilakukan dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melihat seberapa besar koefisien regresi yang berpengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dengan model persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pengelola Keuangan Daerah

α = konstanta

X_1 = Lingkungan Pengendalian

X_2 = Penilaian Resiko

X_3 = Kegiatan Pengendalian

X_4 = Sistem Informasi

X_5 = Pemantauan

Berikut adalah hasil perhitungan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21.0.

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.896	3.482		1.694	.097
	Lingkungan Pengendalian	.269	.201	.217	1.338	.000
	Penilaian Resiko	.532	.249	.394	2.135	.000
	Kegiatan Pengendalian	.063	.117	.057	2.540	.002

Sistem Informasi	.164	.200	.144	2.820	.000
Pemantauan	.105	.113	.098	2.929	.000

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai – nilai sebagai berikut :

Konstant α	= 5,896
(X1)	= 0.269
(X2)	= 0.532
(X3)	= 0.063
(X4)	= 0.164
(X5)	= 0.105

Dari hasil tersebut, maka persamaan regresi linear berganda yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$Y = 5,896 + 0.269 + 0.532 + 0.063 + 0.164 + 0.105 + e$$

Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 5,869 menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan, maka Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 5,869.
- Nilai koefisien regresi Lingkungan Pengendalian sebesar 0.269 atau 26,9% artinya bahwa setiap kenaikan Lingkungan Pengendalian maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 26,9% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.
- Nilai koefisien regresi Penilaian Resiko sebesar 0.532 atau 53,2% artinya bahwa setiap kenaikan Penilaian Resiko maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 53,2% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.

- d) Nilai koefisien regresi Kegiatan Pengendalian sebesar 0.063 atau 6,3% artinya bahwa setiap Kegiatan Pengendalian maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 6,3% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.
- e) Nilai koefisien regresi Sistem Informasi sebesar 0.164 atau 16,4% artinya bahwa setiap kenaikan Sistem Informasi maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 16,4% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.
- f) Nilai koefisien regresi Pemantauan sebesar 0.164 atau 16,4% artinya bahwa setiap kenaikan Pemantauan maka akan diikuti dengan kenaikan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 16,4 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.

4. Pengujian Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) yaitu :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Dari hasil pengelolaan data yang dilakukan dengan SPSS hasil yang ditunjukkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.896	3.482		1.694	.097
1 Lingkungan Pengendalian	.269	.201	.217	1.338	.000
Penilaian Resiko	.532	.249	.394	2.135	.000
Kegiatan Pengendalian	.063	.117	.057	2.540	.002
Sistem Informasi	.164	.200	.144	2.820	.000
Pemantauan	.105	.113	.098	2.929	.000

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Hasil pengujian statistic dari tabel 4.14 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Lingkungan Pengendalian secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteri pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Lingkungan Pengendalian terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Lingkungan Pengendalian (X1) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Lingkungan Pengendalian (X1) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

b. Pengaruh Penilaian Resiko Terhadap Pengelola Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah *Penilaian Resiko* secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Pengelola Keuangan Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteri pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $< \text{probabilitas } 0.05$, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. ap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- c. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $> \text{probabilitas } 0.05$, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Penilaian Resiko terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Penilaian Resiko (X2) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Penilaian Resiko (X2) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

c. Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Kegiatan Pengendalian secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Kegiatan Pengendalian terhadap *Pengelolaan Keuangan Daerah*, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Kegiatan Pengendalian (X3) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. 0.002 < probabilitas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Kegiatan Pengendalian (X3) terhadap *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Y).

d. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Informasi secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $<$ probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $>$ probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Sistem Informasi terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Sistem Informasi (X4) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. 0.000 $<$ probabilitas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Sistem Informasi (X4) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

e. Pengaruh Pemantauan Terhadap Pengelola Keuangan Daerah

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Pemantauan secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Pengelola Keuangan Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteri pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $<$ probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $>$ probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Pemantauan terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Pemantauan (X5) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Pemantauan (X5) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

b) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y) .

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) yaitu :

- a. Jika nilai signifikansi (Sig) < 0.05 , maka hipotesis diterima.
- b. Jika nilai signifikansi (Sig) > 0.05 , maka hipotesis ditolak.

Dari hasil pengelolaan data yang dilakukan dengan SPSS hasil yang ditunjukkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	197.004	5	39.401	11.387	.000 ^b
Residual	169.541	49	3.460		
Total	366.545	54			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pemantauan, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi, Penilaian Resiko

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < 0.05$, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F. dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah.

5. Koefisien Determinasi

R-Square digunakan untuk melihat variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Dalam kegunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam presentase (%). Maka dapat diketahui uji determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.733 ^a	.537	.490	1.86011	.537	11.387	5

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel diatas menunjukkan nilai *R-Square* dalam penelitian ini sebesar 0.537 atau 53,7% yang berarti bahwa presentase pengaruh variabel bebas atau Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan terhadap Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar 53,7% sedangkan selebihnya 46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pengaruh mengenai hasil penemuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut adalah pembahasan dalam pengaruh temuan penelitian ini yang harus mampu menjawab segala pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk nilai Lingkungan Pengendalian terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Lingkungan Pengendalian (X1) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Lingkungan Pengendalian (X1) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian dapat dilakukan dengan cara penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang

kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka pengelolaan keuangan daerah akan mendapatkan dampak yang baik sehingga pengelolaan keuangan bisa berjalan efektif.

Penelitian ini sejalan oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Sinambela, Saragih dan Sari (2018), Ditya dan Suryono (2012) serta Ditya dan Surjono (2012), artinya pegawai di SKPD Kota Medan telah mayoritas merasa bahwa kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif, pelaksanaan anggaran secara efektif ditentukan oleh usaha yang dikerahkan, kemampuan kualitas seseorang, partisipasi, penetapan sasaran, serta persepsi seseorang tentang tugas dan kewajibannya dan pelaporan anggaran rutin dilaksanakan setiap tahun dan dapat dievaluasi.

2. Pengaruh Penilaian Resiko terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk nilai Penilaian Resiko terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Penilaian Resiko (X2) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. 0.000 < probabilitas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Penilaian Resiko (X2) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

Penilaian resiko dapat dilakukan dengan tahapan identifikasi risiko, menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko dan analisis risiko, ketika resiko-resiko dapat ditabulasi dan di analisis tentunya keuangan daerah yang dikelola akan menjadi efektif.

Penelitian ini sejalan oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016), Ditya dan Surjono (2012) dan Sinambela, Saragih dan Sari (2018), hal ini juga mengindikasikan bahwa SKPD di Kota Medan mayoritas mengatakan bahwa di SKPD Kota Medan telah terjadi penilaian terhadap risiko, penetapan metode pengukuran, penentuan batas dan penetapan toleransi risiko dan penetapan pengendalian internal.

3. Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk nilai Kegiatan Pengendalian terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Kegiatan Pengendalian (X3) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.002 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Kegiatan Pengendalian (X3) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur.

Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh Sinambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012), artinya pada SKPD Kota Medan telah terjadi pemisahan kewajiban secara memadai, system otorisasi yang baik, pemberlakuan pengendalian fisik dan pemeriksaan independen atas pelaksanaan kegiatan.

4. Pengaruh Sistem Informasi terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk nilai Sistem Informasi terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Sistem Informasi (X4) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa

hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Sistem Informasi (X4) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah, hal ini dapat dilakukan ketika informasi dan komunikasi pada instansi dapat dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh sinambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012), pada SKPD Kota Medan Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik dan sistem informasi telah membantu pekerjaan di instansi ini.

5. Pengaruh Pemantauan terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga

merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud.

Untuk nilai Pemantauan terhadap Pengelola Keuangan Daerah, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Pemantauan (X5) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Pemantauan (X5) terhadap Pengelola Keuangan Daerah (Y).

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dikeluarkan oleh nambela, Saragih dan Sari (2018) dan Pujiono, Sukarno dan Puspitasari (2016) serta Ditya dan Surjono (2012), dengan demikian di SKPD Kota Medan telah terjadi pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.kegiatan, Pemantauan dilaksanakan secara periodik dan Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal.

6. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan terhadap Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < 0.05$, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F. dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau Lingkungan Pengendalian,

Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
2. Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
3. Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
4. Sistem Informasi berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
5. Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
6. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Kota Medan sebaiknya dapat mempertahankan bahkan meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, dengan cara penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,

kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif

2. Pemerintah Kota Medan juga dapat meningkatkan pelaksanaan prosedur pengendalian internalnya, Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah
3. Dalam hal penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Pengelola Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia sub bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada Masyarakat : Renungan bagi Akuntan Pendidik*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol.05.02. hal. 18- 30
- Nadhira. 2016 Skripsi Akuntansi : *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajaemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Desa di Wilayah Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang)*”.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penetapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*”. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol 24 No. 1. Universitas Islam Riau.
- Sinambela, Elizar., Saragih, Fitriani dan Sari, Eka Nurmala. 2018. *Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara*. EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No. 2, 2018
- Udi Kuncoro. 2017 Skripsi Akuntansi Universitas Lampung : *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Cipmawati Mohune. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)*”. Jurnal.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat* (7th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurun Nafidah. 2015. Skripsi Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : *Pengaruh Kinerja Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Pada Perpustakaan Universitas Indonesia*
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 8 tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN

KUISIONER PENELITIAN

Assalamualikum Wr. Wb

Dengan Hormat, Berkenan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah, maka dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner ini dengan penilaian secara objektif. Data dari Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian semata. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

I. Profil Responden

1. Nama :
2. Jenis kelamin : (1) Laki-Laki (2) Perempuan
3. Usia : (1) < 30 tahun (2) 30-35 tahun (3) 40-45 tahun (4) ≥ 45 tahun
4. Lama Bekerja : (1) <2 Tahun (2) 2-5 Tahun (3) >5 tahun

II. Petunjuk Pengisian

Beri tanda centang (√) pada kolom yang paling sesuai dengan anda. Keterangan: SS= Sangat Setuju

- SS = Sangat Setuju
 S = Setuju
 KS = Kurang Setuju
 TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Y)

NO	Pernyataan	SS (1)	S (2)	KS (3)	TS (4)	STS (5)
1	Kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif.					
2	Tujuan rencana kerja dan anggaran telah disesuaikan dengan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)					
3	Pelaksanaan anggaran secara efektif ditentukan oleh usaha yang dikerahkan, kemampuan kualitas seseorang, partisipasi, penetapan sasaran, serta persepsi seseorang tentang tugas dan kewajibannya.					
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas dan spesifik.					
5	Pelaporan anggaran rutin dilaksanakan setiap tahun dan dapat dievaluasi					
6	Pertanggungjawaban anggaran pada instansi ini dilakukan secara transparan dan dapat diakses dengan mudah.					
7	Penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif dan telah diawasi dengan baik.					

LINGKUNGAN PENGENDALIAN (X₁)

NO	Kebiasaan	SS (1)	S (2)	KS (3)	TS (4)	STS (5)
1	Pemerintah daerah harus memiliki integritas dan nilai-nilai etika.					
2	Pemerintah daerah harus memiliki komitmen terhadap kompetensi.					
3	Pemerintah daerah harus mempunyai falsafah manajemen dan gaya operasi.					
4	Dalam instansi harus memiliki dewan komisaris atau komite audit atau yang setara dengan dewan komisaris atau komite					

	audit.					
5	Adanya pelimpahan tugas dan wewenang dalam instansi.					

PENILAIAN RESIKO (X₂)

NO	Kebiasaan	SS (1)	S (2)	KS (3)	TS (4)	STS (5)
1	Adanya penilaian terhadap risiko.					
2	Adanya penetapan metode pengukuran.					
3	Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi risiko.					
4	Adanya penetapan pengendalian internal.					
5	Didalam instansi harus terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal.					

KEGIATAN PENGENDALIAN (X₃)

NO	Kebiasaan	SS (1)	S (2)	KS (3)	TS (4)	STS (5)
1	Pemisahan kewajiban di instansi harus diterapkan secara memadai.					
2	Di dalam instansi haruslah ada otorisasi					
3	Dilakukannya pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.					
4	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.kegiatan					
5	Pemisahan kewajiban di instansi harus diterapkan secara memadai.					

SISTEM INFORMASI (X₄)

NO	Kebiasaan	SS (1)	S (2)	KS (3)	TS (4)	STS (5)
1	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.					
2	Sistem informasi yang dipakai instansi haruslah berfungsi dengan baik.					
3	Di dalam instansi Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan.					
4	Sistem informasi telah membantu pekerjaan di instansi ini					
5	Sistem informasi telah berjalan baik di instansi ini					

PEMANTAUAN (X₅)

NO	Kebiasaan	SS (1)	S (2)	KS (3)	TS (4)	STS (5)
1	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.kegiatan					
2	Pemantauan dilaksanakan secara periodik.					
3	Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal.					
4	Instansi telah melakukan pemantauan yang baik					
5	Pemantauan sangat berguna dalam peningkatan kinerja					

Responden	Pengelolaan Keuangan Daerah							Total
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	3	3	3	3	2	3	5	22
2	4	4	3	4	4	4	5	28
3	4	4	5	5	4	5	4	31
4	3	3	4	4	4	3	4	25
5	4	5	4	4	4	4	3	28
6	3	3	3	4	4	4	3	24
7	4	5	4	4	3	5	3	28
8	4	5	4	4	3	5	4	29
9	4	3	4	4	3	4	5	27
10	4	4	4	4	3	4	4	27
11	3	3	3	4	4	4	4	25
12	4	4	4	4	3	4	4	27
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	5	4	3	4	4	4	5	29
15	4	5	4	5	4	4	5	31
16	4	4	4	4	4	3	5	28
17	5	4	4	5	4	4	5	31
18	4	5	4	4	3	4	4	28
19	5	5	4	4	4	4	4	30
20	4	3	3	4	4	3	4	25
21	4	4	5	3	4	4	5	29
22	4	4	4	4	3	3	5	27
23	4	4	4	4	5	4	4	29
24	5	5	4	5	5	4	4	32
25	5	5	5	4	4	4	4	31
26	4	3	4	4	5	4	4	28
27	4	4	5	4	4	4	4	29
28	4	4	4	5	4	3	4	28
29	4	4	4	4	4	4	5	29
30	4	5	3	4	4	3	3	26
31	4	4	3	4	4	3	3	25
32	4	5	4	4	4	4	2	27
33	3	3	3	3	2	2	4	20
34	4	4	4	5	4	4	3	28
35	5	5	4	4	4	4	4	30
36	2	3	2	4	3	3	3	20

Responden	Lingkungan Pengendalian					Total
	I	II	III	IV	V	
1	3	3	3	2	3	14
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	3	19
5	4	4	4	5	4	21
6	3	3	3	4	4	17
7	3	3	4	4	3	17
8	3	3	4	4	3	17
9	4	4	3	3	3	17
10	4	4	3	3	4	18
11	3	4	3	4	3	17
12	3	3	4	4	3	17
13	4	3	4	4	3	18
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	3	19
16	4	4	4	4	3	19
17	3	4	4	4	5	20
18	4	3	4	4	4	19
19	5	4	4	4	4	21
20	4	2	3	4	4	17
21	3	3	3	4	3	16
22	4	4	3	4	4	19
23	4	4	4	3	4	19
24	4	5	4	4	4	21
25	4	4	4	4	4	20
26	3	4	5	5	4	21
27	4	4	4	4	4	20
28	3	4	3	4	4	18
29	4	4	4	4	4	20
30	3	3	3	4	3	16
31	4	2	2	4	2	14
32	4	4	4	4	4	20
33	2	4	4	4	5	19
34	4	5	4	3	4	20
35	5	4	5	5	4	23
36	3	3	4	4	4	18

Responden	Penilaian Resiko					Total
	I	II	III	IV	V	
1	3	3	2	2	4	14
2	4	4	4	3	5	20
3	5	5	5	5	4	24
4	3	4	4	4	4	19
5	4	4	4	4	5	21
6	3	3	3	2	5	16
7	4	4	3	3	5	19
8	4	4	3	3	5	19
9	4	4	3	3	5	19
10	3	3	4	4	5	19
11	3	4	4	3	5	19
12	4	4	3	4	5	20
13	4	4	4	4	5	21
14	4	4	4	4	5	21
15	3	4	3	4	5	19
16	4	4	4	4	5	21
17	3	3	4	4	4	18
18	4	3	3	4	4	18
19	4	4	3	4	5	20
20	3	3	2	3	5	16
21	4	4	3	4	4	19
22	4	4	3	4	4	19
23	4	4	4	4	5	21
24	4	3	4	4	4	19
25	4	4	4	4	5	21
26	3	4	3	4	5	19
27	4	4	4	4	5	21
28	4	4	3	4	4	19
29	4	4	4	4	4	20
30	3	3	3	4	4	17
31	3	3	2	3	5	16
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	3	4	4	19
34	4	4	4	4	4	20
35	5	4	5	5	4	23
36	3	3	3	3	3	15

Responden	Kegiatan Pengendalian					Total
	I	II	III	IV	V	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	4	4	4	3	20
3	4	4	5	5	3	21
4	4	3	4	4	3	18
5	3	3	4	3	3	16
6	4	4	3	3	3	17
7	4	3	3	2	2	14
8	5	5	4	4	5	23
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	5	4	5	4	5	23
12	4	4	4	4	4	20
13	5	4	5	5	5	24
14	5	5	4	4	4	22
15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	4	4	4	22
17	4	4	4	5	3	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	5	5	5	4	5	24
21	5	5	4	4	3	21
22	4	5	5	4	3	21
23	4	4	4	5	3	20
24	4	4	4	5	3	20
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	4	24
28	4	4	4	4	3	19
29	4	5	5	4	3	21
30	4	4	5	4	3	20
31	3	4	3	3	3	16
32	5	4	5	4	3	21
33	4	3	4	4	3	18
34	3	4	4	4	3	18
35	4	4	4	4	2	18
36	4	5	4	5	4	22

Responden	Sistem Informasi					Total
	I	II	III	IV	V	
1	2	2	2	2	3	11
2	4	4	4	4	4	20
3	5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	4	3	3	16
7	4	4	3	3	3	17
8	4	4	3	3	3	17
9	4	4	3	4	4	19
10	4	4	3	4	4	19
11	3	4	4	3	3	17
12	4	3	4	4	4	19
13	4	4	3	4	4	19
14	4	4	4	4	4	20
15	4	3	4	3	4	18
16	4	4	4	5	3	20
17	3	4	3	4	4	18
18	3	4	3	4	5	19
19	4	4	5	4	5	22
20	3	4	4	3	2	16
21	4	4	4	5	3	20
22	4	4	4	4	3	19
23	4	4	4	4	3	19
24	4	5	4	5	4	22
25	4	4	4	4	4	20
26	4	5	3	4	3	19
27	4	4	4	4	3	19
28	4	4	5	4	3	20
29	4	5	4	4	3	20
30	3	3	3	3	3	15
31	3	4	3	4	2	16
32	4	4	4	4	3	19
33	4	4	5	4	3	20
34	4	4	4	5	2	19
35	5	5	5	5	5	25
36	3	3	3	3	3	15

Responden	Pemantauan					Total
	I	II	III	IV	V	
1	5	5	5	5	4	24
2	4	4	4	5	4	21
3	4	3	3	4	3	17
4	3	4	3	3	3	16
5	3	4	4	5	3	19
6	4	2	3	4	4	17
7	5	4	4	5	5	23
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	5	4	21
10	5	4	4	4	4	21
11	4	4	4	4	4	20
12	5	4	5	4	5	23
13	4	4	5	4	5	22
14	5	4	5	5	5	24
15	4	4	4	5	5	22
16	5	4	5	3	4	21
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	5	4	4	5	22
20	5	5	4	4	5	23
21	4	4	5	4	4	21
22	4	4	5	5	4	22
23	4	5	5	4	4	22
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	4	4	4	22
26	4	4	5	5	4	22
27	4	4	4	4	5	21
28	4	4	5	4	3	20
29	4	4	4	3	3	18
30	1	3	2	3	2	11
31	4	4	4	4	4	20
32	2	3	4	4	3	16
33	5	3	3	2	4	17
34	4	4	4	4	3	19
35	5	5	5	5	5	25

36	4	5	4	5	4	22
----	---	---	---	---	---	----

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	14	38.9	38.9	38.9
Valid Perempuan	22	61.1	61.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Responden Berdasarkan Usia
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<30 Tahun	8	22.2	22.2	22.2
30-35 Tahun	16	44.4	44.4	66.7
Valid 36-40 Tahun	7	19.4	19.4	86.1
>40 Tahun	5	13.9	13.9	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<2 Tahun	17	47.2	47.2	47.2
Valid 2-5 Tahun	9	25.0	25.0	72.2
>5 Tahun	10	27.8	27.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Ip1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	12	33.3	33.3	36.1
=Setuju	21	58.3	58.3	94.4
Sangat Setuju	2	5.6	5.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Ip2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	5.6	5.6	5.6
Kurang Setuju	10	27.8	27.8	33.3
=Setuju	22	61.1	61.1	94.4
Sangat Setuju	2	5.6	5.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Ip3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	10	27.8	27.8	30.6

=Setuju	23	63.9	63.9	94.4
Sangat Setuju	2	5.6	5.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Ip4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	4	11.1	11.1	13.9
Valid =Setuju	27	75.0	75.0	88.9
Sangat Setuju	4	11.1	11.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Ip5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	12	33.3	33.3	36.1
Valid =Setuju	20	55.6	55.6	91.7
Sangat Setuju	3	8.3	8.3	100.0
Total	36	100.0	100.0	

pr1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	12	33.3	33.3	33.3
=Setuju	22	61.1	61.1	94.4
Sangat Setuju	2	5.6	5.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

pr2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	10	27.8	27.8	27.8
=Setuju	25	69.4	69.4	97.2
Sangat Setuju	1	2.8	2.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

pr3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	3	8.3	8.3	8.3
Kurang Setuju	15	41.7	41.7	50.0
=Setuju	16	44.4	44.4	94.4
Sangat Setuju	2	5.6	5.6	100.0

Total	36	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

pr4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	5.6	5.6	5.6
Kurang Setuju	8	22.2	22.2	27.8
=Setuju	24	66.7	66.7	94.4
Sangat Setuju	2	5.6	5.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

pr5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	1	2.8	2.8	2.8
=Setuju	15	41.7	41.7	44.4
Sangat Setuju	20	55.6	55.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

kp1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	3	8.3	8.3	8.3
=Setuju	21	58.3	58.3	66.7
Sangat Setuju	12	33.3	33.3	100.0

Total	36	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

kp2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	4	11.1	11.1	11.1
=Setuju	21	58.3	58.3	69.4
Sangat Setuju	11	30.6	30.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

kp3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	3	8.3	8.3	8.3
=Setuju	22	61.1	61.1	69.4
Sangat Setuju	11	30.6	30.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

kp4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	3	8.3	8.3	11.1
=Setuju	23	63.9	63.9	75.0
Sangat Setuju	9	25.0	25.0	100.0

Total	36	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

kp5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	5.6	5.6	5.6
Kurang Setuju	17	47.2	47.2	52.8
=Setuju	11	30.6	30.6	83.3
Sangat Setuju	6	16.7	16.7	100.0
Total	36	100.0	100.0	

si1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	8	22.2	22.2	25.0
=Setuju	25	69.4	69.4	94.4
Sangat Setuju	2	5.6	5.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

si2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8

Kurang Setuju	5	13.9	13.9	16.7
=Setuju	26	72.2	72.2	88.9
Sangat Setuju	4	11.1	11.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

si3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	11	30.6	30.6	33.3
=Setuju	20	55.6	55.6	88.9
Sangat Setuju	4	11.1	11.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

si4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	8	22.2	22.2	25.0
=Setuju	21	58.3	58.3	83.3
Sangat Setuju	6	16.7	16.7	100.0
Total	36	100.0	100.0	

si5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	3	8.3	8.3	8.3
Kurang Setuju	17	47.2	47.2	55.6
Valid =Setuju	12	33.3	33.3	88.9
Sangat Setuju	4	11.1	11.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

p1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	5.6
Kurang Setuju	2	5.6	5.6	11.1
Valid =Setuju	22	61.1	61.1	72.2
Sangat Setuju	10	27.8	27.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

p2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Valid Kurang Setuju	4	11.1	11.1	13.9
=Setuju	24	66.7	66.7	80.6

Sangat Setuju	7	19.4	19.4	100.0
Total	36	100.0	100.0	

p3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	4	11.1	11.1	13.9
=Setuju	21	58.3	58.3	72.2
Sangat Setuju	10	27.8	27.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

p4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	4	11.1	11.1	13.9
=Setuju	21	58.3	58.3	72.2
Sangat Setuju	10	27.8	27.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

p5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	7	19.4	19.4	22.2
=Setuju	19	52.8	52.8	75.0
Sangat Setuju	9	25.0	25.0	100.0
Total	36	100.0	100.0	

k1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	5	13.9	13.9	16.7
=Setuju	24	66.7	66.7	83.3
Sangat Setuju	6	16.7	16.7	100.0
Total	36	100.0	100.0	

k2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	9	25.0	25.0	25.0
=Setuju	18	50.0	50.0	75.0
Sangat Setuju	9	25.0	25.0	100.0

Total	36	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

k3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	9	25.0	25.0	27.8
=Setuju	23	63.9	63.9	91.7
Sangat Setuju	3	8.3	8.3	100.0
Total	36	100.0	100.0	

k4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Setuju	3	8.3	8.3	8.3
=Setuju	29	80.6	80.6	88.9
Sangat Setuju	4	11.1	11.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

k5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	5.6	5.6	5.6
Kurang Setuju	8	22.2	22.2	27.8
=Setuju	25	69.4	69.4	97.2

Sangat Setuju	1	2.8	2.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

k6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	9	25.0	25.0	27.8
=Setuju	23	63.9	63.9	91.7
Sangat Setuju	3	8.3	8.3	100.0
Total	36	100.0	100.0	

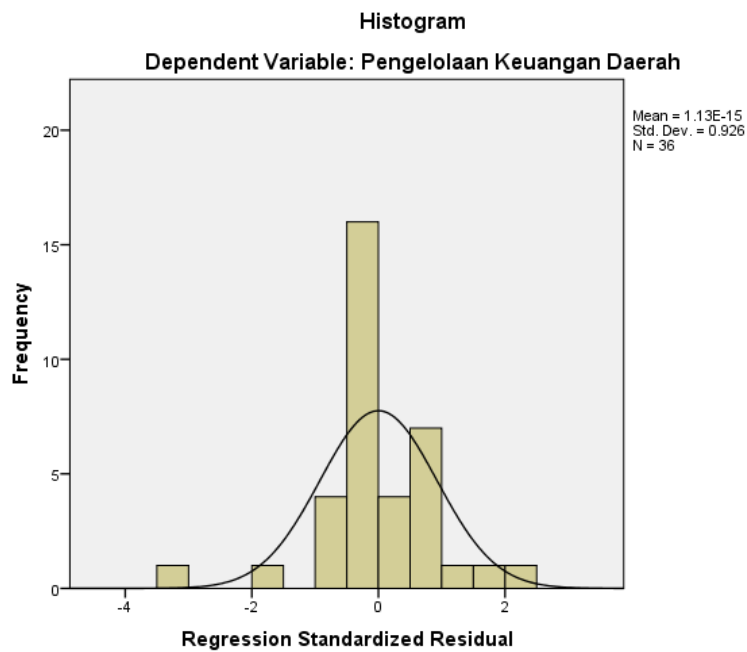
k7

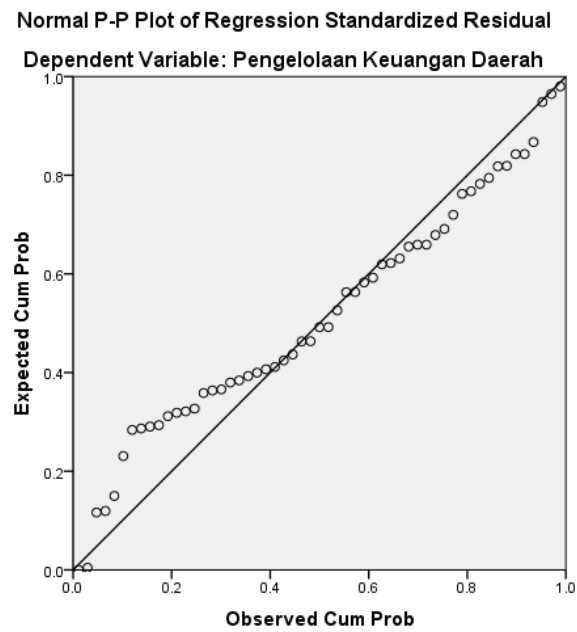
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2.8	2.8	2.8
Kurang Setuju	7	19.4	19.4	22.2
=Setuju	18	50.0	50.0	72.2
Sangat Setuju	10	27.8	27.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

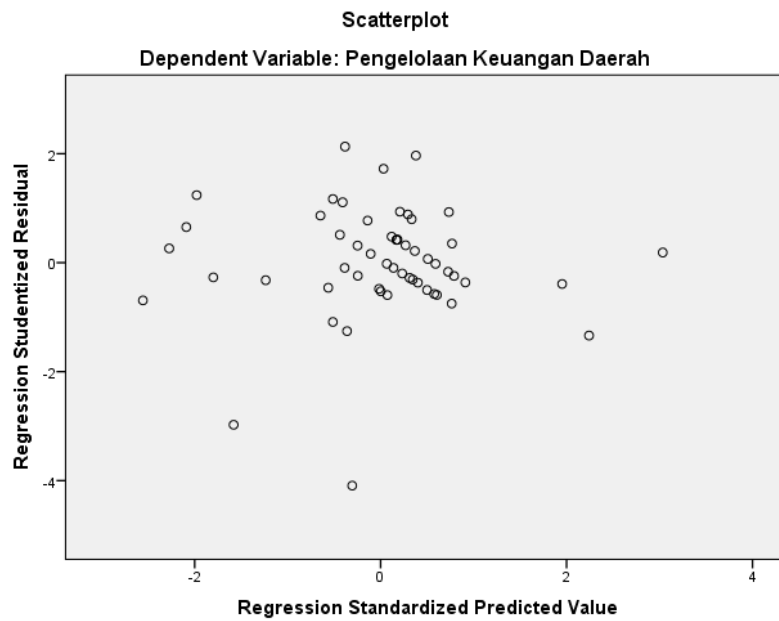
		Lingkunga n Pengenda lian	Kegiatan Pengend alian	Sistem Informasi	Pemantau an	Pengelolaa n Keuangan Daerah	Penilaian Resiko
N		36	36	36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19.2364	20.0000	19.0000	20.1818	27.9091	19.4182
	Std. Deviation	2.09906	2.34126	2.29331	2.42740	2.60536	1.93114
Most Extreme Differences	Absolute	.206	.191	.222	.143	.223	.251
	Positive	.128	.191	.222	.100	.138	.152
	Negative	-.206	-.136	-.191	-.143	-.223	-.251
Kolmogorov-Smirnov Z		1.525	1.416	1.649	1.060	1.654	1.859
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069	.076	.079	.212	.128	.122





Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)					
1					
Lingkungan Pengendalian	.644	.188	.130	.359	2.787
Penilaian Resiko	.700	.292	.207	.277	3.611
Kegiatan Pengendalian	.109	.077	.052	.847	1.181
Sistem Informasi	.635	.116	.080	.306	3.273
Pemantauan	.246	.132	.090	.847	1.180



Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	49 ^a	.000	1.615

Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.896	3.482		1.694	.097
	Lingkungan Pengendalian	.269	.201	.217	1.338	.000
	Penilaian Resiko	.532	.249	.394	2.135	.000
	Kegiatan Pengendalian	.063	.117	.057	2.540	.002
	Sistem Informasi	.164	.200	.144	2.820	.000
	Pemantauan	.105	.113	.098	2.929	.000

Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.896	3.482		1.694	.097
	Lingkungan Pengendalian	.269	.201	.217	1.338	.000
	Penilaian Resiko	.532	.249	.394	2.135	.000
	Kegiatan Pengendalian	.063	.117	.057	2.540	.002
	Sistem Informasi	.164	.200	.144	2.820	.000
	Pemantauan	.105	.113	.098	2.929	.000

Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	197.004	5	39.401	11.387	.000 ^b
	Residual	169.541	49	3.460		
	Total	366.545	54			

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.733 ^a	.537	.490	1.86011	.537	11.387	5



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 24 Ramadhan 1442 H
6 Mei 2021 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M I F T A H U L J A N N A H

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 1 2 0

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 2 1 F E B R U A R I
1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L K A R Y A D A M E N O I I C

Tempat Penelitian : B A D A N P E M E L I T I A N D A N
P E N G E M B A N G A N K O T A
M E D A N

Alamat Penelitian : J L K A P T E M M A U L A N A
L U B I S N O 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E, M. Si)

Wassalam.
Pemohon

(Miftahul Jannah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2161/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/3/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 4/3/2021

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Miftahul Jannah
NPM : 1705170120
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1 :
Tingkat Efektifitas Sistem Internal Control yang rendah
Judul 2 :
Tingkat Kesesuaian terhadap SAP yang perlu ditingkatkan
Judul 3 :
3. Opini Audit masih belum konsisten mencapai hal yang maksimal

Rencana Judul : 1. Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan
2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Kota Medan
3. Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintah Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Miftahu Jannah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2161/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/3/2021

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
NPM : 1705170120
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 4/3/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si (15 Maret 2021)

Judul Disetujui**)

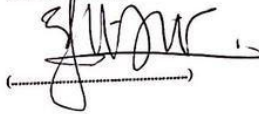
Pengaruh Sistem pengendalian Intern
Terhadap Pengelolaan Keuangan
Daerah pada Pemerintah Kota Medan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 19/3/2021

Dosen Pembimbing

()

Keterangan
*) Data oleh Program Program Studi
**) Data oleh Dosen Pembimbing
Sendalah diupload oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan upload ke Lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1146/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 19 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Miftahul Jannah
 N P M : 1705170120
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
 Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 25 Mei 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 13 Syawal 1442 H
 25 Mei 2021 M




 Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
 1. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1144/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021 Medan, 13 Syawal 1442 H
 Lampiran : 25 Mei 2021 M
 Perihal : **Izin Riset**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
 Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Miftahul Jannah
 Npm : 1705170120
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




 Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
 1. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2336/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 1144/II.3-AU/UMSU-05/F/2021. Tanggal: 25 Mei 2021. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Miftahul Jannah.
NPM : 1705170120.
Prog/Bagian : Akuntansi.
Lokasi : OPD se-Kota Medan, sebagaimana terlampir.
Judul : " Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan ".
Lamanya : 3 (Bulan) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 28 Mei 2021

Kepala BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS,

Dra. STP MAHRANI HASIBUAN
MED PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala OPD se-Kota Medan, sebagaimana terlampir.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kanton Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
NPM : 1705170120
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Data harus relevan ada di setiap paragraf. perbaiki tujuan penulis	6/5 21	3/
Bab 2	Buat teori yg adalah pada. banyak konsep ke teori mudi 3 orke.	6/5 21	2/
Bab 3	paper 2 sampai. milih yg di pake	6/5 21	3/
Daftar Pustaka	salah 3 dosen selo uma	6/5 21	3/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	instrumen perbaiki lagi.	6/5 21	2/
Persetujuan Seminar Proposal	ACC proposal lanjut ke seminar.	3/6 21	3/

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Fitriani Satriani
(.....)

Medan, 3 Juni 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Eka Nurmala Sari
(.....)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini **Jumat, 11 Juni 2021** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : **Miftahul Jannah**
NPM. : 1705170120
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 21 Februari 1999
Alamat Rumah : Jln. Karya Dame Gang Nasly No. 11 C Medan
Judul Proposal : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan
Bab I	1. Penyusunan judul berbentuk piramida terbalik, sebutkan alamat sumber pada tabel.
Bab II	1. Harus konsisten dalam semua pengutipan teori dan sesuaikan dengan pedoman, perbaiki kerangka konseptual jika ada Y seharusnya ada X, sesuaikan hipotesis dengan kata-kata pada rumusan masalah.
Bab III	1. Waktu penelitian tidak sesuai tabel, sebutkan total populasi dan sebutkan jumlah sampel. Lampirkan kuesionernya dan tidak cocok meneliti saat pandemi seperti ini ke tempat penelitian, pegawai malas menjawab nantinya. 2. Perbaiki rumus regresi liner berganda karena tidak jelas.
Lainnya	
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 11 Juni 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurjula Sari, SE., M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Hj. Hafsa, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 11 Juni 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Miftahul Jannah
NPM : 1705170120
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 21 Februari 1999
Alamat Rumah : Jln. Karya Dame Gang Nasly No. 11 C Medan
Judul Proposal : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Eka Numa Sari, SE., M.Si.*

Medan, 11 Juni 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulfa Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Numa Sari, SE., M.Si

Pemanding

Hj. Hafsah, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan



Dr. Adc. Annawar, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah
 NPM : 1705170120
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal, pengumpulan dan penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti siding meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 30 Agustus 2021

Pembuat Pernyataan



MIFTAHUL JANNAH

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No : 070/4095/Balitbang/2021

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/2336/Balitbang/2021 Tanggal: 28 Mei 2021, dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : Miftahul Jannah.
NPM : 1705170120.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi Penelitian : OPD Se-Kota Medan, sebagaimana terlampir.
Judul : " Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan ".
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan dan telah menyerahkan (1 (satu) set soft copy hasil penelitian.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 22 September 2021

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Drs. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIK 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.

Daftar : Lampiran Surat Rekomendasi Riset.
 Nomor : 070/1017/Balitbang/2021.
 Hal : Izin Riset.

No.	KEPALA OPD
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan
3.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
5.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
7.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
12.	Kepala Dinas Sosial Kota Medan
13.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
14.	Kepala Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan
15.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
20.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
24.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan
25.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan
26.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan
27.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan
28.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
29.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan
30.	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan
31.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan

Dikeluarkan di : Medan.

Pada tanggal : 22 September 2021

An. Kepala Balitbang Kota Medan

BADAN Sekretaris
 PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN

Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN

PEMBINA TK. I

NIP. 19661208 198603 2 002